JIAP FIA UB

JIAP Vol 4, No 4, pp 320-330, 2018
© 2018 FIA UB. All right reserved
ISSN 2302-2698
e-ISSN 2503-2887

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)

URL: <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>

Sikap Warga Komunitas Lokal terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (Suatu Studi pada Warga Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)

M. Chazienul Ulum^a*

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 16 Oktober 2018

Revisi pertama tanggal: 19 November 2018

Diterima tanggal: 27 Desember 2018

Tersedia online tanggal: 04 Januari 2019

Keywords: *development, PLTP, local community, geothermal*

ABSTRACT

One of the regions in East Java that has the potential as a major electricity producer is Ponorogo Regency. The Government of Ponorogo Regency itself through the Regional Regulation (Perda) of Ponorogo District Number 1 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Ponorogo Regency (2012-2032) has regulated the development of infrastructure to increase electricity productivity by developing Geothermal Power Plants in Ngebel District. This then attracted the attention of domestic investors, namely PT. Darmakarya Energi Bakrie to establish a Geothermal Power Plant (PLTP) in the Ngebel Village area, Ngebel District, Ponorogo Regency. The development that has been planned will be able to run as expected together if it receives a positive response from the community. So it would have been a necessity if planning, implementing, and the results of development should be oriented towards the community, including the local community.

INTISARI

Salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sebagai penghasil listrik yang besar adalah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo (Tahun 2012-2032) telah mengatur mengenai pengembangan prasarana guna meningkatkan produktivitas listrik dengan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di wilayah Kecamatan Ngebel. Hal ini kemudian menarik perhatian investor dalam negeri yaitu PT. Bakrie Darmakarya Energi untuk mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Pembangunan yang telah dicanangkan ini akan dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Sehingga kiranya sudah menjadi suatu keniscayaan jika perencanaan, pelaksanaan, beserta hasil pembangunan hendaknya berorientasi pada masyarakat, termasuk komunitas lokal.

2018 FIA UB. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +62-853-3491-6305; e-mail: mochamad.ulum@gmail.com

1. Pendahuluan

Pembangunan dapat dinyatakan sebagai sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Diera globalisasi yang lajunya semakin cepat seperti sekarang ini, tugas utama pemerintah ialah untuk menjamin apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini akan dapat berjalan sesuai harapan bersama apabila mendapat tanggapan positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran (dalam Yuwono, 2001:54) bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakat lah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana tujuan diselenggarakannya, pembangunan membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Pertama, membuka banyak lapangan kerja, hal ini dikarenakan banyaknya proyek-proyek yang membutuhkan sumber daya manusia. Berbagai ahli akan didatangkan untuk menyelesaikan suatu program tertentu seperti pembuatan ruas jalan tol, perumahan, dan lainnya. Kedua, pembangunan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini karena seiring dengan munculnya beragam jenis kegiatan seperti industri, transportasi atau pertanian maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara perlahan-lahan. Ketiga, pembangunan juga dapat membuka investasi di berbagai bidang, dengan kegiatan pembangunan maka beberapa investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan masuk sehingga aliran modal semakin banyak. Keempat, pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah akan menghasilkan suatu titik kutub pertumbuhan baru. Hal ini akan mendorong pertumbuhan wilayah itu sendiri. Berbagai daerah akan berlomba mengeluarkan semua potensi terbaiknya untuk kemajuan masyarakatnya. Dan yang kelima, pembangunan menaikkan derajat negara di mata dunia. Pembangunan akan menambah devisa dan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa di dunia. Pembangunan yang cepat akan menaikkan derajat negara itu sendiri di mata negara-negara lain di dunia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentang garis khatulistiwa memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Sumber daya alam ini adalah sumber energi yang krusial bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan. Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Sinar matahari, angin, biomassa, gelombang laut, air yang mengalir (*hidro*), dan panas bumi (*geothermal*) sebagai proses alam yang berkelanjutan selalu tersedia di Indonesia. Sumber energi tersebut adalah sumber

energi penting yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim serta pemanasan global. Realitas ini menegaskan bahwa sumber energi yang tidak merugikan lingkungan dan ekologi telah tersedia. Dewasa ini tidak ada alasan untuk tidak mengelola energi terbarukan sebagai energi alternatif. Disamping karena sumber energi terbarukan tersedia secara melimpah, lestari dan tidak akan habis, juga karakter energi ini relatif ramah lingkungan (rendah atau tidak ada limbah dan polusi) dan sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan investasi teknologi yang sesuai.

Selanjutnya, keberadaan gunung api merupakan penyedia utama energi *geothermal*. Potensi energi tersebut yang terdapat di Indonesia diperkirakan mencapai 28,98 MWe atau kurang lebih 40% dari potensi *geothermal* didunia yang tersebar dalam sekitar 256 lokasi. Dari potensi yang ada, sekitar 203 lokasi (sekitar 80%) tersebar di daerah gunung api sehingga dinamakan *volcano-geothermal*, sedangkan sekitar 53 (20%) tersebar di daerah *non-volcano*. Jumlah masing-masing daerah prospek *geothermal* Indonesia yaitu 84 daerah di Sumatera, 76 daerah di Jawa, 51 daerah di Sulawesi, 21 daerah di Nusa Tenggara, 3 daerah di Papua, 15 daerah di Maluku, dan 5 prospek di Kalimantan (Sukhyar, 2011).

Jawa Timur adalah salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang dikaruniai potensi sumber daya energi dan mineral yang beragam dan melimpah. Jika ditelusuri dari arah Utara ke Selatan (mulai dari pesisir dan perairan Laut Jawa sampai dengan pesisir Lautan Hindia) dan dari arah Barat ke Timur (mulai perbatasan Jawa Timur – Jawa Tengah sampai dengan pesisir Selat Bali, ditemui sumber dan pusat-pusat kekayaan alam yang bisa dikelompokkan menjadi dua sumber daya mineral: mineral energi (minyak dan gas bumi serta panas bumi) dan mineral bahan galian logam/nonlogam/ industri (pasir timah, sulfur, fosfat, mika, belerang, fluorit, felspar, ziolit dan diatomea). Ditengah isu dan diskursus tentang krisis energi serta menipisnya jumlah cadangan migas di Indonesia, potensi sumber daya mineral energi di Jawa Timur merupakan angin segar yang membawa optimisme masa depan sumber daya energi di Indonesia. Saat ini eksplorasi energi panas bumi di Jawa Timur merupakan solusi terbaik mengantisipasi keterbatasan.

Berdasarkan informasi yang dilansir dalam situs tumoutounews.com (anonymous, 2017), Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang surplus listrik. Kelebihan persediaan listrik dimanfaatkan Gubernur dengan mengajak investor asing untuk berinvestasi di Jawa Timur. Beberapa negara tetangga seperti Thailand dan China tertarik berinvestasi di Jawa Timur karena ketersediaan energi listrik yang cukup baik.

Berdasarkan data dari PT. PLN Distribusi Jawa Timur (2011-2016) Produksi listrik pada tahun 2016 mencapai 35,08 juta MWh, atau naik 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2011, produksi listrik sudah mengalami kenaikan 34,1 persen. Sementara itu, daya terpasang terendah tercatat di kantor cabang Situbondo sebesar 315,8 ribu KVA diikuti kantor cabang Ponorogo sebesar 464,8 ribu KVA. Jika dilihat berdasarkan konsumsi listrik, kantor cabang Surabaya Selatan tercatat tertinggi sebesar 3,95 juta MWh, diikuti Mojokerto (3,7 juta MWh), Pasuruan (3,41 juta MWh) dan Sidoarjo (3,06 juta MWh). Konsumsi listrik terkecil tercatat di kantor cabang Ponorogo dan Situbondo masing-masing 498,8 ribu MWh dan 638,2 ribu MWh. Ketersediaan listrik menjadi hal yang sangat krusial, mengingat listrik merupakan pendorong perekonomian wilayah.

Meskipun Kabupaten Ponorogo menurut data di atas tercatat sebagai daerah dengan konsumsi listrik terkecil, namun wilayah ini memiliki potensi sebagai penghasil listrik yang cukup besar yang terletak di wilayah Kecamatan Ngebel. Potensi panas bumi Ngebel terletak pada daerah gunung Wilis kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Survey pendahuluan dilaksanakan oleh Pertamina (persero). Selanjutnya dengan penyelidikan lebih rinci meliputi analisa geologi, analisa geokimia, analisa geofisika dan analisa pengeboran minyak didapatkan hasil air Padusan dengan temperatur 74°C, batuan ubahan dan fumanol dengan temperature 87,7°C, perkiraan suhu bawah permukaan sekitar 240°C, luas wilayah prospek sekitar 15 Km persegi, kondisi lingkungan merupakan endapan vulkanik gunung Wilis, dan potensi cadangan terduga 120 MW. Potensi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik 330 ribu sambungan rumah.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan dibangun di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, berdasarkan data dari situs kompas.com (Al Alawi, 2017), diperkirakan akan menghasilkan potensi listrik sebesar 55 MW. Pada saat ini, kontraktor pemenang tender PLTP tersebut telah melakukan pelebaran jalan untuk memudahkan lalu lintas kendaraan-kendaraan besar yang melintas untuk kepentingan pembangunan PLTP. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari berita online, proyek pembangunan tersebut ditargetkan akan selesai pada 2020 mendatang (Al Alawi, 2017).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo (Tahun 2012-2032) telah mengatur mengenai pengembangan prasarana guna meningkatkan produktivitas listrik dengan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di wilayah

Kecamatan Ngebel. Disebutkan bahwa wilayah Kecamatan Ngebel merupakan kawasan peruntukan pertambangan yakni panas bumi geothermal. Bahkan wilayah Kecamatan Ngebel juga disebutkan sebagai wilayah industri pengolahan etanol dan panas bumi. Dalam Perda RTRW tersebut ditetapkan mengenai kawasan strategis yang salah satunya menyebutkan bahwa Rencana Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber daya alam dan/ atau Teknologi Tinggi baik di tingkat Propinsi meliputi Kawasan pengembangan potensial panas bumi, yaitu Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

Namun demikian, kiranya sudah menjadi suatu keniscayaan jika perencanaan, pelaksanaan, beserta hasil pembangunan hendaknya berorientasi pada masyarakat, termasuk komunitas lokal. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembangunan, karena keterlibatan masyarakat diperlukan sebagai upaya memadukan model top down dengan bottom up agar program-program dalam pembangunan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan sekaligus menjadi sarana motivasi untuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan rasa ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan (Suryono, 2010:254). Hal inilah yang mendasari penelitian ini penting untuk dilakukan, dengan batasan sejauh mana sikap warga terhadap suatu objek pembangunan, khususnya terkait persepsi dan penerimaan atau penolakan mereka. Untuk itu, peneliti mengambil judul "*Sikap Warga Komunitas Lokal terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) (Suatu Studi pada warga Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)*".

2. Teori

2.1 Pembangunan

Menurut Siagian (2005:142) pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern tetapi terlihat tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Dalam proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dandidak adan pernah dicapai secara absolut.

Menurut Syamsi (1986:34), pembangunan ialah proses kegiatan mulai dari *input – conversion – output* juga dapat diterapkan. Input terdiri atas komponen-komponen pembangunan (sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi) dan tuntutan

kebutuhan–kebutuhan (demands). *Input* merupakan keadaan sebelum pembangunan, keadaan yang mengandung masalah yang harus dipecahkan. *Output* yang berupa hasil pembangunan, merupakan, keadaan setelah adanya pembangunan, keadaan yang diinginkan atau diharapkan lebih baik daripada sebelum pembangunan. Konversi, proses pengubahan dari keadaan yang ada atau keadaan sebelum pembangunan dimana terjadi masalah untuk kemudian diubah atau diusahakan menjadi output (hasil yang lebih baik).

2.2 Konsep Sikap

2.2.1 Pengertian dan Batasan Sikap

Penelitian ini akan menelaah hal-hal yang terkait dengan kecenderungan warga komunitas lokal dalam menyikapi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Ponorogo. Dalam konteks ini, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut (Mar'at, 1992:131). Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi baru merupakan suatu tendensi atau kecenderungan (*predisposition*).

Untuk itu, terdapat 2 (dua) penekanan yang harus menjadi atensi. Pertama, bahwa sikap sulit dilihat dan diamati serta diukur secara langsung karena merupakan suatu keadaan mental dan sistem syaraf dalam pribadi atau kepribadian seseorang. Untuk mengidentifikasinya memerlukan konfirmasi langsung kepada individu yang bersangkutan. Kedua, sikap menunjukkan suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu (objek). Hal ini dapat merefleksikan prakondisi seseorang untuk berperilaku. Jadi, sikap merupakan kecenderungan terhadap perilaku atau suatu tendensi untuk bertindak. Kecenderungan itu bisa bersifat positif atau negatif. Disinilah pentingnya posisi sikap yang menjadi salah satu dari ranah kepribadian manusia.

2.2.2 Struktur Sikap

Sikap mengandung 3 (tiga) komponen yaitu kognisi, afeksi, dan konasi (Mar'at, 1992:131). Kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecenderungan bertindak. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai suatu objek dari sikap. Seringkali sesuatu terpolakan dalam pikirannya tersebut merupakan pemikiran yang negatif atau stereotip. Pemikiran dan kepercayaan negatif datang atau berasal dari apa saja yang telah dilihat atau yang telah diketahui. Tentu saja kepercayaan ini kadang kurang akurat kebenarannya

karena mungkin disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh.

Komponen afektif, menyangkut masalah emosional subjek seseorang terhadap suatu objek dari sikap. Komponen ini sering disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang. Perwujudan antara satu orang dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Jadi, komponen afektif atau yang menentukan reaksi emosional ini, banyak ditentukan oleh kepercayaan seseorang terhadap objek.

Komponen konatif, sikap manusia menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku seseorang terhadap objek sikap yang dihadapi. Asumsi dasar bahwa kepercayaan seseorang dan perasaannya mempengaruhi perilakunya. Artinya, kecenderungan untuk berperilaku banyak ditentukan bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tertentu. Dengan kata lain, kecenderungan untuk berperilaku selaras atau konsisten dengan kepercayaan dan perasaannya yang membentuk sikap individu yang bersangkutan. Pengertian kecenderungan untuk berperilaku seseorang di sini bukan berarti harus dijawabantahkan ke dalam perilakunya saja, akan tetapi dapat berupa pernyataan atau perkataan saja.

Dari ketiga komponen sikap tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan untuk bertindak (terhadap objek sikap) dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen sikap, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Apabila dihadapkan pada pertanyaan, maka komponen kognitif menjawab pertanyaan tentang apa yang dipersepsikan atau dipikirkan tentang objek. Komponen afektif akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (suka atau tidak suka, senang atau tidak senang) terhadap suatu objek. Sedangkan komponen konatif akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan atau kesiapan bertindak terhadap suatu objek.

Bertitik tolak dari uraian tentang sikap seperti telah dipaparkan, maka sikap dapat dinyatakan sebagai suatu respons untuk bereaksi terhadap objek tertentu sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Dalam penelitian ini, sikap warga komunitas lokal terhadap rencana pembangunan PLTP dapat dimanifestasikan melalui persepsi, pendapat, statement persetujuan atau penolakan, hingga kecenderungan bertindak menyikapi rencana pembangunan tersebut. Dengan identifikasi dari munculnya sikap tertentu dapat diprediksikan perilaku yang sekiranya akan muncul.

2.3 Sosialisasi

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada. Kemudian, Melalui kerja sama yang erat diharapkan

masyarakat merasa memiliki sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja. Kemudian, Diharapkan masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih berarti.

Namun pada umumnya suatu aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Memperkenalkan apa yang akan disampaikan;
- b) Untuk menarik perhatian;
- c) Tercapainya pemahaman;
- d) Perubahan sikap; dan
- e) Tindakan.

2.4 Komunitas

Menurut The Royal Society of Edinburgh (2014:3), komunitas menyiratkan suatu kelompok yang dapat dideskripsikan dimana individu adalah anggotanya. Komunitas yang dimaksud dapat berada di seberang batas geografis, dengan keanggotaan murni berdasarkan pada kepentingan bersama. Komunitas yang didefinisikan oleh kepentingan bersama jauh lebih abstrak dan ini membuat perubahan pada tingkat komunitas yang didefinisikan dengan cara ini jauh lebih menantang.

Esensi dari pembangunan berbasis komunitas/ masyarakat (*community-based development*) yang lalu memberikan inspirasi pada model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) adalah upaya pemberdayaan komunitas berdasarkan integrasi ide-ide kemandirian. Komunitas adalah pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses pendayagunaan sumberdaya. Penekanannya terletak pada kewenangan komunitas mengelola sumberdaya untuk mewujudkan kepentingannya. Hal ini dirancang berdasarkan prakarsa dan partisipasi melalui orientasi kebutuhan, potensi dan kemampuan komunitas (lokal), namun dengan tetap memperhatikan variasi dan perbedaan yang ada dalam komunitas tersebut.

2.5 Energi Berkelanjutan

Secara definisi di UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut. Menurut Prayitno (2005) ada enam energi terbarukan antara lain energi *geothermal*, energi *sustainable*, energi surya, energi angin, energi biomass, dan energi air. Energi *geothermal* atau panas bumi sendiri merupakan energi pancaran dan radiasi yang dapat digunakan untuk memasak. *Geothermal* adalah energi yang dihasilkan dengan cara mengambil panas bumi. Ada tiga macam *power plants* yang digunakan

untuk mendapatkan energi dari energi *geothermal*, yaitu *dry steam*, *flash*, dan *binary*.

Dengan adanya energi berkelanjutan maka akan menghemat ketersediaan sumberdaya energi saat ini, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada yang ada yang bisa dijadikan energi dalam kebutuhan manusia. Maka dari itu, perlunya perencanaan energi untuk mewujudkan energi yang berkelanjutan. Perencanaan energi yang baik harus mampu mengintegrasikan semua subsektor energi, termasuk sektor energi pedesaan dan faktor yang terkait dengan sektor energi sebagai satu kesatuan.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dipilih untuk mengumpulkan informasi secara rinci, menggambarkan dan mengidentifikasi masalah yang selanjutnya memeriksa data mengenai sikap warga komunitas lokal terhadap rencana pembangunan PLTP Ponorogo. Menurut Arikunto (2009:234), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada dan selanjutnya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokusnya mengacu pada ranah/ indikator sikap dari warga komunitas lokal dalam menyikapi rencana pembangunan PLTP Ponorogo.

- a) Sikap (pandangan dan pemahaman) warga komunitas lokal terhadap manfaat dan risiko/ dampak pembangunan PLTP ke depan; dan
- b) Penerimaan atau penolakan (berupa pernyataan sikap dan kecenderungan bertindak, beserta alasannya) warga komunitas lokal terhadap rencana pembangunan PLTP.

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini ialah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sementara itu, yang menjadi situs dalam penelitian ini ialah di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Bappeda Kabupaten Ponorogo, SDA Setda Kabupaten Ponorogo, Dinas PUPR Kabupaten Ponorogo dan DPKP Kabupaten Ponorogo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli dengan cara mengamati, mencatat dan mewawancarai langsung pihak yang berkaitan dengan pembangunan PLTP. Peneliti dalam menentukan informan awal terlebih dahulu melakukan pengamatan, kemudian peneliti memilih informan secara purposive pada subjek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti atau *key informan*. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan agar menjadi informasi, tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Selain itu, peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Pegawai Bappeda, SDA Setda, Dinas PUPR, dan DPKP Kabupaten Ponorogo; dan
- b) Kepala/ perangkat Desa Ngebel.

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan model Creswell. Alasan peneliti memilih analisis data model Creswell ini karena sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian data. Komponen analisis data model Creswell (2014) terdiri dari enam alur tahapan atau kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mengolah data dan mempersiapkan untuk dianalisis;
- b) Membaca keseluruhan data;
- c) Menganalisis lebih detail dengan *men-coding* data;
- d) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema untuk kemudian dianalisis;
- e) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif; dan
- f) Menginterpretasikan atau memaknai data.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan eksplorasi panas bumi di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 yang diprakarsai oleh PT. Bakrie Darmakarya Energi, rencana usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi panas bumi ini akan dilakukan oleh PT. Bakrie Darmakarya Energi, yakni perusahaan minyak dan gas bumi yang merupakan salah satu pemasukan devisa bagi negara. Perusahaan tersebut akan melakukan eksplorasi (pengeboran) panas bumi di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo dan telah mendapatkan ijin dari Gubernur Jawa Timur dengan

dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/63/KPTS/119.3/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Panas Bumi kepada PT. Bakrie Darmakarya Energi di Desa Dagangan, desa Mendak, dan desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun serta Desa Gondowido dan Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dokumen UKL-UPL ini juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi, terdapat potensi limbah B3 yang dapat dihasilkan. Sehingga akan mengacu pada PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

Keberadaan rencana usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi panas bumi ini diprakarsai oleh PT. Bakrie Darmakarya Energi. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemrakarsa terhadap implementasi pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/63/KPTS/119.3/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Panas Bumi kepada PT. Bakrie Darmakarya Energi. Selain itu juga merupakan bentuk usaha yang secara tidak langsung dapat membantu program pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Berikut dijelaskan uraian garis besar komponen rencana usaha dan/ atau kegiatan dari eksplorasi panas bumi yang meliputi:

- a) Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan tata Ruang. Bahwasanya rencana usaha atau kegiatan eksplorasi panas bumi secara teknis dan legalitas telah sesuai dengan Perda Jatim Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi yaitu Pasal 79 ayat 7 mengenai Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada poin h, yaitu Telaga Ngebel di Kabupaten Madiun dan Ponorogo
- b) Penjelasan Persetujuan Prinsip. Rekomendasi persetujuan prinsip terkait rencana usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi panas bumi menjadi satu kesatuan atas dikeluarkannya SK Gubernur Nomor 188/63/KPTS/119.3/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Panas Bumi kepada PT. Bakrie Darmakarya Energi di Desa Dagangan, Desa Mendak, dan Desa Segulung di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun serta Desa Gondowido dan Desa Ngebel di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2682K/30/MEM/2015 tentang Izin Panas Bumi PT. Bakrie Darmakarya Energi di Wilayah Kerja Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

- c) Tahap Pelaksanaan Komponen Usaha dan/ atau Kegiatan yang Menimbulkan Dampak. Tahap pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi panas bumi secara umum dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra kegiatan eksplorasi, kegiatan eksplorasi, dan pasca eksplorasi yang diilustrasikan melalui bagan dibawah ini:

Gambar 1 Tahap pelaksanaan usaha dan/ atau kegiatan eksplorasi panas bumi

Sumber: Hasil analisis, 2018

Aktivitas usaha atau kegiatan eksplorasi panas bumi yang diprakarsai oleh PT. Bakrie Darmakarya Energi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, baik dampak secara langsung maupun tak langsung. Selain berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan tetapi juga berdampak terhadap masyarakat sekitar yang keduanya memiliki hubungan sebab akibat yang cukup erat. Prediksi dampak lingkungan yang akan terjadi dilakukan untuk mengetahui dan memprediksikan sedini mungkin dampak apa saja yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat kegiatan operasional aktivitas eksplorasi yang dengan demikian dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Komponen lingkungan yang terkena dampak secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga komponen lingkungan utama, yaitu: komponen lingkungan fisik-kimis; komponen lingkungan biologi, dan; komponen lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.

PT. Bakrie Darmakarya Energi sebagai pemrakarsa telah menyiapkan rencana upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, terutama dampak negatif yang muncul dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap tindakan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut diperoleh beberapa upaya perbaikan

dan peningkatan pengelolaan dan pemantauan yang didasarkan dari perkembangan rona lingkungan yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi pengelolaan dan pemantauan serta beberapa penyesuaian dengan peraturan perundangan yang baru. Salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan lingkungan adalah semakin sadar dan kritisnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang sedang berkembang, yang merupakan tantangan positif bagi PT. Bakrie Darmakarya Energi agar dapat melakukan upaya dan pemantauan yang baik terhadap lingkungan.

Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara fisik juga diimbangi dengan upaya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui beberapa kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Salah satunya melalui program CSR sebagai tanggung jawab sosial pemrakarsa kepada masyarakat yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan atau usaha yang dijalankan. Upaya pengelolaan dampak lingkungan akan dilakukan secara holistik mencakup faktor teknis, ekologis, manajerial, kelembagaan dan sosial budaya sebab pengelolaan dampak tidak bisa hanya diselesaikan dari satu faktor saja. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pengelolaan dan pemantauan dampak akan mencacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau standar baku yang ada yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya dan kondisi lingkungan yang ada. Terkait hal ini, keterlibatan stakeholder yang ada, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sendiri sangat diperlukan.

4.1 Sikap Warga Komunitas Lokal terhadap Manfaat dan Risiko/ Dampak Pembangunan PLTP ke Depan

Menurut Mar'at (1992:131), sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Mar'at menyebutkan bahwa sikap mengandung 3 (tiga) komponen yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai suatu objek dari sikap. Seringkali sesuatu yang terpolakan dalam pikirannya tersebut merupakan pemikiran yang negatif atau stereotip. Pemikiran dan kepercayaan negatif datang atau berasal dari apa saja yang telah dilihat atau yang telah diketahui. Tentu saja kepercayaan ini kadang kurang akurat kebenarannya karena mungkin disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Ngebel sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ngebel, Mujianto, percaya bahwa pembangunan PLTP di Desa Ngebel akan membawa dampak yang kurang baik. Hal tersebut didorong oleh beberapa temuan dan

fakta di lapangan yaitu bencana atau dampak negatif yang terjadi di beberapa wilayah akibat aktivitas pengeboran. Salah satu contoh kasus yang sangat dikhawatirkan akan terjadi pula di Desa Ngebel ialah tragedi Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sehingga masyarakat berfikir bahwa kemungkinan terjadinya bencana serupa akan tetap ada karena dalam pembangunan PLTP ini juga melalui proses pengeboran seperti halnya PT. Lapindo.

Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat Desa Ngebel percaya bahwa pembangunan PLTP tersebut hanya membawa dampak negatif saja tanpa ada dampak positifnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa Ngebel, dengan adanya pembangunan PLTP tersebut telah membantu Pemerintah Desa Ngebel dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan yang ada di desanya. Berkat adanya pembangunan tersebut, akses jalan menuju wilayah yang paling dekat dengan lokasi eksplorasi yakni Dukuh Jawol semakin mudah. Pasalnya jalan yang sebelumnya masih sempit dan mengalami kerusakan saat ini sudah diperbaiki dan dilakukan pelebaran jalan oleh pemrakarsa PLTP. Meskipun tujuan utamanya ialah untuk memudahkan mobilisasi kendaraan dan alat berat yang keluar masuk lokasi, namun masyarakat setempat juga ikut merasakan manfaat jalan ini.

Selain itu, Kepala Desa Ngebel juga percaya bahwa PT. Bakrie Darmakarya Group akan memberikan CSR sebagaimana yang telah dijanjikan untuk masyarakat Desa Ngebel. CSR ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan ke masyarakat karena telah mendirikan PLTP di Desa Ngebel. Dengan demikian akan terbentuk sebuah simbiosis mutualisme dengan terbangunnya hubungan saling menguntungkan satu sama lain.

Sementara itu, komponen afektif menyangkut masalah emosional subjek seseorang terhadap suatu objek dari sikap. Komponen ini sering disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang. Perwujudan antara satu orang dengan yang lainnya bisa sangat berbeda. Jadi, komponen afektif atau yang menentukan reaksi emosional ini, banyak ditentukan oleh kepercayaan seseorang terhadap objek.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Ngebel sendiri, pada awalnya masyarakat Desa Ngebel merasa khawatir akan dilaksanakannya proyek PLTP di Desa Ngebel. Masyarakat percaya bahwa proyek tersebut nantinya akan membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat setempat sehingga membuat mereka merasa takut untuk menyetujui pembangunan proyek tersebut. Rasa takut ini juga disertai kekhawatiran jika pembangunan PLTP di Desa Ngebel dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang hingga saat ini masih terpelihara dengan baik.

mengingat wilayah Kecamatan Ngebel termasuk Desa Ngebel sendiri memiliki potensi alam yang sangat baik mulai dari bidang pariwisata hingga pertanian, maka kelestariannya harus terus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengeringnya sumber air yang dapat menghilangkan kesuburan tanah sehingga tanaman milik warga mati.

Komponen ketiga ialah konatif, sikap manusia menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku seseorang terhadap objek sikap yang dihadapi. Dengan kata lain, kecenderungan untuk berperilaku selaras atau konsisten dengan kepercayaan dan perasaannya yang membentuk sikap individu yang bersangkutan. Pengertian kecenderungan untuk berperilaku seseorang disini bukan berarti harus diejawantahkan kedalam perilakunya saja, akan tetapi dapat berupa pernyataan atau perkataan saja.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala Desa Ngebel. Dengan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembangunan PLTP di desanya, meskipun hanya berbentuk kata-kata dan bukan tindakan, secara tidak langsung ia telah menunjukkan komponen konatif. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Desa Ngebel maupun masyarakatnya sendiri untuk melakukan tindakan di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai rencana ataupun perjanjian sebelumnya. Hal ini telah diungkapkan sendiri oleh Kepala Desa Ngebel bahwa pihaknya akan melakukan tindakan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai di kemudian hari. Tindakan tersebut dapat berupa mediasi atau bahkan aksi yang melibatkan keikutsertaan masyarakat Desa Ngebel.

Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Ngebel dari belum setuju menjadi setuju ini distimulasi dengan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak pemrakarsa yang intensitasnya cukup sering. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut di antaranya memperkenalkan apa yang akan disampaikan, untuk menarik perhatian, tercapainya pemahaman, perubahan sikap, dan tindakan.

Pertama, sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan apa yang akan disampaikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Bakrie Darmakarya Energi, sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Ngebel terkait rencana pembangunan PLTP. Hal ini harus dilakukan karena bagaimanapun masyarakat Desa Ngebel berhak untuk mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan di wilayahnya, terlebih jika kegiatan itu dilakukan oleh pihak yang berasal dari luar Desa Ngebel. Dengan kata lain, sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan rencana

pembangunan PLTP sekaligus meminta izin dan dukungan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Ngebel demi kelancaran proyek PLTP ini.

Kedua, sosialisasi bertujuan untuk menarik perhatian. Dengan menyelenggarakan sosialisasi, pihak pemrakarsa PLTP akan menarik perhatian masyarakat dan Pemerintah Desa Ngebel yang wilayahnya akan dijadikan sebagai lokasi eksplorasi. Hal ini sangat penting terutama bagi desa yang masyarakatnya relatif apatis terhadap perkembangan isu pembangunan di daerahnya sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami bagaimana pembangunan tersebut akan berjalan, termasuk dampak-dampak yang akan ditimbulkannya. Namun dalam hal ini, masyarakat Desa Ngebel sendiri menurut pengamatan peneliti merupakan masyarakat yang cukup aktif dan kritis terhadap isu pembangunan yang ada di desanya. Hal ini ditunjukkan dengan inisiatif untuk melakukan studi banding terlebih dahulu di daerah yang dapat memberikan contoh realisasi pembangunan PLTP. Dengan demikian, mereka akan memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak.

Ketiga, sosialisasi dilakukan demi tercapainya pemahaman. Setelah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, secara perlahan akan terbentuk pemahaman dalam diri masyarakat itu sendiri. Pemahaman ini bisa dikatakan sebagai akumulasi dari informasi yang telah diperoleh sehingga membentuk pengetahuan yang kemudian menjadi landasan dalam menentukan sikap. PT. Bakrie Darmakarya Energi menginginkan agar masyarakat Desa Ngebel sebagai tuan rumah memahami terlebih dahulu rencana proyek PLTP sebelum dijalankan. Dengan demikian, tidak akan ada kesalahpahaman antara pihak pemrakarsa dengan masyarakat Desa Ngebel yang dapat memicu perselisihan antara kedua belah pihak kedepannya. Hal inilah yang sangat dihindari, baik oleh pihak pemrakarsa maupun masyarakat Desa Ngebel sendiri sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi, sosialisasi mutlak diperlukan.

Keempat, sosialisasi diperlukan untuk membuat perubahan sikap. Perubahan sikap yang dimaksud disini adalah sikap dari pihak yang diberikan informasi atau pemahaman yang dalam hal ini ialah masyarakat Desa Ngebel. Sebagaimana yang diketahui, pada mulanya masyarakat Desa Ngebel menunjukkan sikap yang kurang pro terhadap rencana pembangunan PLTP di wilayahnya. Hal tersebut didasari oleh kekhawatiran terhadap dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan kedepannya apabila pembangunan tetap dilaksanakan. Untuk itu, pihak pemrakarsa terus melakukan sosialisasi secara intensif dengan harapan masyarakat Desa Ngebel dapat melihat sisi baik dari

adanya pembangunan tersebut dan menghilangkan kekhawatiran yang ada pada hati mereka. Usaha ini terbukti berhasil dapat merubah sikap masyarakat Desa Ngebel dari yang semula kurang setuju menjadi setuju atas dilaksanakannya pembangunan PLTP di desanya.

Terakhir, tindakan. Dalam pengertian bisnis, sosialisasi disini bertujuan untuk memicu tindakan pelanggan untuk menggunakan produk yang berupa barang atau jasa yang diproduksi oleh organisasi atau perusahaan. Namun dalam kasus pembangunan PLTP di Desa Ngebel ini, makna tindakan yang dimaksud tentu saja tidak demikian. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak bermaksud untuk mempromosikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan pemrakarsa. Sosialisasi yang dilaksanakan disini dimaksudkan untuk membuat satu titik temu antara PT. Bakrie Darmakarya Energi selaku pemrakarsa pembangunan PLTP dengan masyarakat Desa Ngebel selaku penghuni dari lokasi didirikannya PLTP. Dengan kata lain, sosialisasi bertujuan untuk membentuk suatu pemahaman bersama sehingga menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Terlepas dari bagaimanapun sikap yang ditunjukkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Desa Ngebel sendiri, pembangunan PLTP di Desa Ngebel telah berjalan. Meskipun demikian, pembangunan ini harus terus dikawal oleh pemerintah dan masyarakat sekitar sehingga tidak merugikan masyarakat Desa Ngebel kedepannya. Mengingat Ngebel adalah wilayah pegunungan yang memiliki banyak komoditas hasil pertanian dan perkebunan, jangan sampai keberadaan PLTP ini justru merusak sumber mata pencaharian penduduk setempat tersebut. Dokumen AMDAL yang telah dibuat hendaknya memang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya di lapangan tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga dapat dijadikan acuan dan pedoman yang baik dalam pelaksanaan pembangunan PLTP di Desa Ngebel.

4.2 Penerimaan atau Penolakan Warga Komunitas Lokal terhadap Rencana Pembangunan PLTP

Setiap proyek pembangunan hampir selalu menuai berbagai respon dari masyarakat di sekitarnya. Respon tersebut beragam, bisa positif ataupun negatif. Respon ini biasanya merefleksikan sikap masyarakat terhadap pembangunan tersebut, apakah itu berupa penerimaan ataukah sebaliknya, yaitu penolakan. Terkait pembangunan PLTP di Desa Ngebel sendiri, sikap penerimaan atau penolakan ini pun juga ditunjukkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa Ngebel, penerimaan yang diberikan masyarakat Desa Ngebel terhadap rencana pembangunan PLTP tidak terjadi secara serta merta. Pemerintah dan masyarakat

Desa Ngebel menurut hemat peneliti, sebenarnya telah menunjukkan sikap yang kritis sebelum menyetujui rencana pembangunan tersebut. Hal ini ditandai dengan sikap mereka yang mempertanyakan perihal dampak yang akan ditimbulkan apabila proyek tersebut nantinya berjalan. Tentu saja dampak yang dimaksud itu lebih condong ke arah negatif yang menjadi kekhawatiran masyarakat setempat.

Setelah menerima jawaban dari pihak PT. Bakrie Darmakarya Energie, pemerintah bersama masyarakat Desa Ngebel tidak langsung mengiyakan rencana tersebut. Mereka berinisiatif untuk meminta studi banding ke berbagai wilayah agar dapat memiliki gambaran tentang bagaimana proyek tersebut akan berjalan nantinya. Selain itu, mereka juga menginginkan agar sosialisasi lebih dipersering frekuensinya sehingga masyarakat dapat memahami rencana proyek tersebut lebih dalam lagi.

Langkah ini, menurut hemat peneliti patut diapresiasi. Sebab meskipun hidup di wilayah perdesaan, masyarakat Desa Ngebel telah memiliki kesadaran dan inisiatif untuk menentukan langkah apa yang akan diambil sebelum menerima pembangunan tersebut. Hal ini tentu saja diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan adanya studi banding dan sosialisasi yang memadai, masyarakat menjadi tahu apa saja dampak positif dan negatif yang timbul. Sehingga, setelah masyarakat membandingkan keuntungan dan kerugian yang mungkin akan diterima, mereka dapat menentukan sikap untuk menerima atau menolak pembangunan tersebut.

Seperti yang telah diketahui, masyarakat Desa Ngebel telah sepakat untuk menyetujui adanya pembangunan PLTP tersebut dengan berbagai pertimbangan dan perjanjian dengan pihak pemrakarsa. Masyarakat telah menerima ganti rugi atas pembebasan lahan milik warga oleh pihak pemrakarsa untuk membangun segala infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan PLTP mulai dari akses jalan hingga titik pengeboran. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penerimaan tersebut tidak serta merta diberikan warga kepada pihak pemrakarsa melainkan melalui proses yang panjang. Untuk itu, pihak pemrakarsa hendaknya harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Desa Ngebel dengan menjamin keselamatan warga dan kelestarian alam sekitar.

Pertanggungjawaban sosial melalui CSR juga sangat diperlukan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Ngebel yang wilayahnya menjadi titik eksplorasi. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak perusahaan mengingat risiko yang harus diambil oleh masyarakat Desa Ngebel juga tidak bisa disepelekan. Dengan adanya CSR ini, diharapkan dapat memberikan

manfaat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngebel ke depannya.

Penerimaan masyarakat Desa Ngebel atas dibangunnya PLTP di Desa Ngebel adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada pihak PT. Bakrie Darmakarya Energi selaku pemrakarsa. Oleh sebab itu, perusahaan ini harus selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan tidak mengecewakan masyarakat Desa Ngebel. Perusahaan hendaknya tidak hanya mengutamakan kepentingannya sendiri namun juga memikirkan nasib dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar yang terkena dampak pembangunan PLTP. Sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen UKL-PL, bahwa perusahaan hendaknya mengutamakan masyarakat sekitar untuk bekerja dalam pembangunan tersebut sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat memperoleh pekerjaan dan secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran di Desa Ngebel.

Disisi lain, masyarakat beserta Pemerintah Desa Ngebel harus terus mengawal pembangunan PLTP yang didirikan di desanya ini. Apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, masyarakat melalui Pemerintah Desa Ngebel dapat menyampaikan aspirasinya kepada PT. Bakrie Darmakarya Energi selaku pihak pemrakarsa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Ngebel, tidak menutup kemungkinan akan adanya aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Ngebel jika nantinya ada hal-hal yang tidak sesuai muncul di kemudian hari. Kepala Desa Ngebel menyatakan bahwa aksi yang dilakukan tersebut tidak melulu melakukan demonstrasi yang melibatkan massa melainkan dengan melakukan mediasi terlebih dahulu. Namun, jika nantinya tidak ditemukan titik terang atau jalan keluar dan dengan melakukan mediasi justru pihak perusahaan mengambil untung sendiri, aksi yang dilakukan massa dirasa bukan lagi menjadi tabu. Meskipun demikian perlu diingat bahwa unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan hendaknya tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama dengan cara tidak memicu keributan.

5. Kesimpulan

a) Selama ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang dianggap perlu dalam rangka realisasi pembangunan PLTP sehingga dapat mempengaruhi persepsi komunitas/ masyarakat setempat. Dalam konteks ini, ada 2 (dua) hal yang saling terkait:

- Program/ kegiatan sosialisasi seputar pembangunan PLTP, termasuk mengenai isu AMDAL, sudah diadakan oleh pihak pemerintah, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga

provinsi. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh pihak korporasi; dan

- Pandangan komunitas lokal terhadap pembangunan PLTP dilingkungan sekitar mereka selama ini masih 'normal', dalam arti baik-baik saja. Hal ini dikarenakan adanya upaya sosialisasi, baik dari pihak pemerintah maupun korporasi. Namun di sisi lain juga ada temuan penelitian bahwa sebagian anggota warga komunitas belum sepenuhnya mengetahui adanya proyek pembangunan tersebut, bahkan dari aparat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo sendiri.
- b) Berkaitan dengan tanggapan dan alasan warga komunitas lokal bahwa selama ini belum/ tidak ada respons tertentu, baik yang bersifat pro maupun kontra, yang signifikan, misalnya berupa pernyataan sikap mendukung atau bahkan menolak proyek pembangunan PLTP. Selain itu, belum/ tidak ada kecenderungan tindakan warga komunitas yang menentang proyek pembangunan tersebut dengan alasan (sebagian) mereka sudah menerimanya. Lagipula, dari hasil observasi peneliti di lapangan diperoleh fakta bahwa proses proyek pembangunan PLTP masih berjalan lambat. Biasanya keluhan atau protes publik itu muncul setelah ada dampak/ kerugian yang dialami oleh mereka.

Wilayah Kabupaten Ponorogo (Tahun 2012-2032).

- Siagian, Sondang P. (2005). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sukhyar, R. (2011). Pengembangan geothermal di Indonesia: Menanti pembuktian (Geothermal development in Indonesia: Waiting for realization). *Paper for National Seminar on Geothermal: Our Savior for a Better Tomorrow*, 12 February. Bandung.
- Suryono, Agus. (2010) *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Pembangunan*. Malang: UB Press Malang.
- Syamsi, Ibnu. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- The Royal Society of Edinburgh. (2014). *Advice Paper: Community Empowerment and Capacity Building*. Edinburgh: Scotland's National Academy.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sumber Energi Terbarukan
- Yuwono, Teguh. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.

Daftar Pustaka

- Al Alawi, Muhlis. (2017). *Bakrie Eksplorasi Tiga Sumur Geothermal Ponorogo-Madiun*. Kompas.com [Internet], 25 Agustus 2017. Dapat diakses pada <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/25/075043626/bakrie-eksplorasi-tiga-sumur-geothermal-ponorogo-madiun>. [Diakses pada 22 Juli 2018].
- Anonymous. (2017). *Kebutuhan Listrik di Jawa Timur*. Tumoutounews [Internet], 17 November 2017. *Kebutuhan Listrik di Jawa Timur*. Dapat diakses pada <https://tumoutounews.com/2017/11/17/kebutuhan-listrik-di-jawa-timur/> [diakses pada 25 Juli 2018].
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mar'at. (1992). *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang